

**PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KARAKTER  
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Periode 2019-2020)**

**SKRIPSI  
UNTUK UJIAN SKRIPSI**



Oleh :

**ULFA NIAN**

**1801035089**

**S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020)

Nama Mahasiswa : Ulfa Nian  
NIM : 1801035089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1-Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 10 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Set Asmapane, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA  
NIP. 19670811 199702 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 2 Oktober 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif  
Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020)

Nama : Ulfa Nian  
NIM : 1801035089  
Hari : Senin  
Tanggal Ujian : 2 Oktober 2023

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Set Asmapane, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPA  
NIP. 19670811 199702 1 001



2. Dr. Iskandar , S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19670516 199802 1 001



3. Eka Fibriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19910207 201903 2 020



## RIWAYAT HIDUP



**Ulfa Nian**, lahir di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yonatan Padang dan Ibu Jeni Tulak. Pada tahun 2005 penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Katolik St. Fransiskus Assisi Sangatta. Kemudian, pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Katolik St. Fransiskus Assisi Sangatta hingga lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Fransiskus Assisi Sangatta hingga lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sangatta Utara hingga lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, penulis diterima menjadi mahasiswa Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Kemudian pada tahun 2021, penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Covid-19 di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 11 Oktober 2023

Ulfa Nian

## ABSTRAK

Ulfa Nian. **Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020)**. Dibimbing oleh Set Asmapane. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Dalam penentuan sampel, penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 42 data dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Koneksi politik dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. 2) Koneksi politik dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. 3) Karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** Agresivitas Pajak, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi, Karakter Eksekutif.

## **ABSTRACT**

*Ulfa Nian. The Effect of Political Connections and Executives Characteristic on Tax Aggressiveness (Case Study of Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2020 Period). Supervised by Set Asmapane. This study aims to examine the effect of political connection in the board of commissioners, political connection in the board of directors, and executives characteristic on tax aggressiveness in companies listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2020 period. In determining the sample, this study uses purposive sampling method which obtained 42 data from mining sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange for the 2019-2020 period. The data used in this study is secondary data and hypothesis testing using multiple linear regression analysis method. The result of this study indicate that: 1) Political connection in the board of commissioners has a significant and positive effect on tax aggressiveness; 2) Political connections in the board of directors has a positive but not significant effect on tax aggressiveness; 3) Executives characteristic has a significant and positive effect on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Tax Aggressiveness, Political Connection in the board of commissioners, Political Connection in the board of directors, Executives Characteristic.*

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 8 September 2023



Ulfa Nian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Nian  
NIM : 1801035089  
Program Studi : S1-Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada **UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman**. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 11 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Ulfa Nian

NIM. 1801035089



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah dan kasih Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulwaarman. terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Dr. Set Asmapane, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPA selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam dalam proses penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, S.E., M.Si selaku Dosen penasehat yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan.
8. Seluruh staf Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta serta seluruh keluarga saya yang mendukung baik secara materi maupun moral, serta semangat dan doa yang selalu diberikan.
10. Rekan-rekan di KMC yang sudah berbagi ilmu dan banyak pengalaman selama penulis melaksanakan magang.
11. Nelcie Patibang, Rumintang Marsella Pangaribuan, dan Christine Gabriela, sahabat yang sudah kebersamai suka dan duka penulis sejak SD hingga kini.
12. Segenap teman teman akuntansi angkatan 2018 yang telah bersama-sama menempuh kehidupan perkuliahan.

Akhir kata penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan, kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Samarinda, 11 Oktober 2023



Ulfa Nian

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. Teori Agensi.....	10
2.1.2. Agresivitas Pajak.....	12
2.1.3. Koneksi Politik Dewan Komisaris .....	14
2.1.4. Koneksi Politik Dewan Direksi.....	15
2.1.5. Karakter Eksekutif .....	16
2.2. Penelitian Terdahulu .....	17

2.3. Kerangka Konseptual .....	23
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	26
2.3.1. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak .....	26
2.3.2. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak .....	27
2.3.3. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	32
3.1.1. Variabel Dependen (Agresivitas Pajak) .....	32
3.1.2. Variabel Independen (Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif) .....	33
3.2. Populasi dan Sampel .....	36
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	37
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5. Analisis Data .....	38
3.5.1. Uji Deskriptif .....	38
3.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	39
3.5.3. Model Regresi Linier Berganda .....	40
3.5.4. Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	41
3.5.5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	41
3.5.6. Uji Hipotesis .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
4.2. Analisis Data .....	45
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	45
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	46
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
4.2.4 Hasil Uji F .....	53
4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54
4.2.6 Hasil Uji Hipotesis .....	54
4.3. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis .....	57
4.3.1. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak .....	57
4.3.2. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak .....	59
4.3.3. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1. Simpulan .....	65
5.2. Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .....	2
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3. 1 Penentuan Jumlah Sampel .....	37
Tabel 4. 1 Perusahaan Sampel .....	44
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif .....	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi .....	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data .....	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi .....	51
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji F .....	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 2. 2 Model Penelitian .....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Tabulasi Data.....	70
Lampiran 2. Tabulasi Data Rasio Karakter Eksekutif .....	72
Lampiran 3. Tabulasi Data Rasio Agresivitas Pajak.....	74
Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	76
Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data .....	76
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data ke LN .....	77
Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data ke LAG .....	79



## DAFTAR SINGKATAN

ETR	<i>Effective Tax Rate</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
EBIT	<i>Earning Before Interest and Taxes</i>
EAT	<i>Earning After Tax</i>
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
PDB	Pendapatan Domestik Bruto

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberlangsungan suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan negara yang sumbernya dari perpajakan, keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan Badan Layanan Umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan hibah. Diantara sumber penerimaan negara yang telah disebutkan, sumber terbesar berasal dari perpajakan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 sebanyak 72,73% belanja negara didanai oleh pendapatan pajak. Melalui penerimaan pajak, negara dapat mendanai kegiatan dalam pemerintahan serta pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Atas dasar inilah, baik orang pribadi maupun badan dituntut memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku guna keberlangsungan dan pembangunan negara.

Dari sudut pandang subjek pajak baik orang pribadi maupun badan, pembayaran pajak kepada negara dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan atau laba yang dimiliki. Khususnya bagi wajib pajak badan (perusahaan), pajak seringkali ditafsirkan sebagai beban yang akan mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu sebagai imbasnya semakin tinggi laba yang dimiliki suatu perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan kepada negara juga semakin besar. Hal inilah yang mendasari dilakukannya upaya tertentu dalam meminimalkan beban pajak atau yang

lazim disebut agresivitas pajak sehingga laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan tersebut.

Melansir dari klikpajak.id, pencapaian kuartal I tahun 2019 sebesar 15,78%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 sebesar 17,17% yang berarti turun sebesar 1,39%. Hal ini mengindikasikan terdapat penurunan penerimaan pajak di kuartal I tahun 2019 yang tidak sejalan dengan peningkatan perekonomian yang sedang digencarkan. Dalam artikel yang diterbitkan klikpajak.id, salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan adanya praktik penghindaran pajak melalui aktivitas *underground economy* yaitu aktivitas ekonomi legal serta illegal yang disembunyikan dari otoritas resmi. Tujuan aktivitas tersebut antara lain penghindaran pembayaran pajak, penghindaran birokrasi pemerintah, pemanfaatan kualitas institusi politik, dan aturan hukum yang lemah. Selaras dengan artikel tersebut, Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menampilkan target dan realisasi penerimaan pajak negara tahun 2018-2020 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat**

Tahun	Target (triliun)	Realisasi (triliun)	Persentase
			Realisasi
2018	Rp1.618	Rp1.518	93,86%
2019	Rp1.786	Rp1.546	86,55%
2020	Rp1.424	Rp1.316	91,50%

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target yang ditentukan. Bahkan di tahun 2020 terjadi penurunan target yang cukup drastis yaitu dari Rp1,786 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1.424 triliun di tahun 2020. Hal ini juga tak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bahkan dalam artikel yang diterbitkan kemenkeu.go.id menyatakan bahwa realisasi PPN dan PPnBM di tahun 2020 berkontraksi 15,3% yang berarti terdapat penurunan konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi yang dipercepat. Dalam hal ini adanya insentif pajak juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020.

Sejalan dengan artikel yang diterbitkan kompas.com pada 8 Desember 2020, terdapat penurunan pada *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2018 sebesar 11,4% dan tahun 2019 sebesar 10,7%, hal ini berarti terdapat penurunan sebesar 0,7%. Kemudian terjadi penurunan lagi di tahun 2020 menjadi 8,57%. *Tax ratio* sendiri menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan yang dirumuskan dalam penerimaan pajak dibagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Adanya penurunan *tax ratio* di tahun 2019 dan 2020 mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak oleh wajib pajak (Kurniawan et al., 2020).

Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian negara salah satunya bagi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia. Dari data yang diterbitkan BPS, pada tahun 2019 sektor

pertambangan memberikan sumbangsih ke PDB Negara sebesar 8,13% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7,75%. Adanya penurunan tersebut juga tidak terlepas dari efek pandemi COVID-19 diseluruh Indonesia yang turut melemahkan perekonomian Indonesia bahkan dunia. Selain itu, industri sektor pertambangan juga masih menjadi salah satu penyokong yang cukup diandalkan bagi perekonomian dikarenakan Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutamasumber daya mineral (emas, tembaga, nikel, timah, dan lainnya) dan batubara.

Fenomena tindakan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan salah satunya terjadi pada PT Adaro. Menurut laporan yang diunggah oleh *Global Witness* dengan judul *Taxing Time for Adaro*, diketahui sejak tahun 2009 sampai 2017 PT Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia ke salah satu cabang perusahaannya di Singapura. Dalam hal ini, profit atas menggali kekayaan alam di Indonesia yang semestinya dilaporkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. PT Adaro meraup keuntungan yang besar namun pajak yang dikontribusikan pada negara justru tidak sebanding dengan sumber daya yang diambil.

PT Vale dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengajukan Putusan Kembali atas penolakan banding sebelumnya yang menyatakan dari pihak pemohon bahwa PPh Pasal 23 Masa September 2012 seharusnya menyatakan nihil. Namun Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84695/PP/M.XIB/12/2017 menyatakan menolak banding pemohon terhadap keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-

958/WPJ.15/2015 pada tanggal 19 Agustus 2015 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh 23 Masa September 2012. Adapun hasil putusan menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali PT Vale dikarenakan alasan - alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena sifatnya berupa pendapat yang tidak melemahkan bukti bukti yang terungkap oleh DJP, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali termasuk sanksinya menjadi Rp238.529.858. Adanya upaya ini Peninjauan Kembali adalah hak dari Wajib Pajak namun hal ini juga mengindikasikan adanya usaha penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang kemudian terungkap oleh DJP.

Menurut Frank et al., (2009) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau cara yang ilegal (*tax evasion*). Dalam situasi ini status legal dan tidak legal bersifat tidak jelas penghalangnya sehingga lebih ditentukan oleh otoritas pajak setelah terjadi (Lee et al., 2015). Meskipun praktik ini tidak melanggar aturan perpajakan akan tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Banyak faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam upaya bertindak agresif terhadap pajaknya. Koneksi politik adalah salah satu determinan tindak agresivitas pajak yang ditemukan oleh (Faccio, 2007). (Goldman et al., 2009) juga menunjukkan bahwa koneksi politik adalah sumber daya berharga untuk sebuah perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Koneksi

politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk didalamnya kepentingan perpajakan (Wicaksono, 2017). Atas fenomena tindak agresivitas pajak pada PT Adaro yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa fenomena ini mendukung bahwa koneksi politik adalah salah satu upaya penghindaran pajak dikarenakan terdapat tokoh politik pada PT Adaro saat itu yaitu Sandiaga Salahudin Uno.

Pemanfaatan koneksi politik banyak dijumpai pada negara-negara berkembang dimana koneksi politik yang ada dilakukan dengan menempatkan pihak yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi dengan struktur organisasi perusahaan baik komisaris maupun direksi (Fisman, 2001). (Faccio, 2007) juga menemukan bahwa salah satu faktor yang memicu koneksi politik adalah jika negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. *Corruption Perception Index (CPI) Indonesia* menurut *Transparency International Organization* di tahun 2020 berada pada skor 37/100 dan menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun sebesar 3 poin dari skor tahun 2019 yaitu 40, yang berarti tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat.

Beragam riset terdahulu mengenai pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Kim dan Zhang (2016), Ferdiawan dan Fimansyah (2017), Putri (2018), Fajri (2019) menunjukkan hasil bahwa koneksi politik memiliki pengaruh terhadap tindak agresivitas pajak. Namun penelitian oleh Pranoto dan Widagdo (2015) serta Lestari dan Putri (2017) menunjukkan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adanya

keberagaman penelitian terdahulu menjadi salah satu faktor peneliti tertarik untuk kembali mengangkat variabel koneksi politik. Dalam penelitian ini koneksi politik dibagi menjadi koneksi politik dewan direksi dan koneksi politik dewan komisaris.

Aspek lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu karakter para top eksekutif atau pimpinan perusahaan. (Dyrenge et al., 2010) memaparkan bahwa eksekutif memegang peranan dalam menambah nilai perusahaan maupun menentukan skema penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa karakter dari setiap individu eksekutif akan menentukan seberapa besar tingkat agresivitas yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karakter eksekutif atau karakter pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) terbagi menjadi *risk taker* dan *risk averse* yang dapat diukur dari besar kecilnya tingkat risiko perusahaan (Budiman, 2012). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis salah satunya tindakan agresivitas pajak, sedangkan eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung menitikberatkan pada keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian hubungan antara beberapa variabel yaitu koneksi politik dewan direksi, koneksi politik dewan komisaris, dan karakter eksekutif sebagai variabel independen serta agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Peneliti menggunakan tahun penelitian selama periode 2019-2020 atas objek perusahaan pertambangan dikarenakan di tahun tersebut pertambangan terutama batu bara mengalami tekanan, dapat dilihat dari setengah dari populasi dalam



penelitian ini yang mengalami kerugian. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian yang dikehendaki yaitu Pengaruh Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh koneksi politik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh koneksi politik dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis mengenai pengaruh koneksi politik dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.
2. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis mengenai pengaruh koneksi politik dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.
3. Memperoleh bukti empiris dan menganalisis mengenai pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kaitan teori agensi dengan kesadaran aspek koneksi politik dan karakter eksekutif sebagai faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan riset atau penelitian mengenai kaitan koneksi politik dan karakter eksekutif dengan agresivitas pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori dan penambahan referensi mengingat belum banyak penelitian yang mengkaji faktor koneksi politik dalam penghindaran pajak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi**

(Jensen & Meckling, 1976) mengemukakan *agency theory* (teori agensi) sebagai hubungan atau konflik yang terjadi ketika *principal* memberikan suatu wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Penerapan teori agensi diwujudkan dalam kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (Kartana & Ni Gusti Agung Sri, 2018). Kontrak kerja yang dimaksud berupa seperangkat aturan yang mengatur terkait mekanisme bagi hasil. Pada hakikatnya teori agensi adalah pengaturan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal konflik kepentingan (Fajri, 2019).

Dalam penerapan teori keagenan seringkali terdapat asimetri informasi antara *principal* dengan manajer yang dikarenakan manajer (*agent*) memperoleh informasi yang lebih banyak terkait operasional perusahaan dibanding *principal*. Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam memaksimalkan laba perusahaan, namun pengelolaan perusahaan lebih banyak dipegang oleh manajer sehingga manajer dapat menggunakan beragam upaya dalam mewujudkan sasaran perusahaan baik melalui cara yang wajar maupun yang merugikan beberapa pihak.

Kenyataan yang terjadi, sering terdapat manipulasi informasi yang dilaporkan oleh manajer kepada pemilik perusahaan demi menjaga kepentingan pribadi manajer tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer tentu akan mempengaruhi banyak hal yang terkait dengan kondisi perusahaan, diantaranya yaitu pengambilan keputusan dalam mengelola pajak perusahaan. Salah satu penerapan praktik ini yaitu melalui laporan pembayaran atas beban dan kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan.

Adanya kebijakan *self assesment system* dalam perpajakan memberikan kewajiban pada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri beban pajaknya. Hal inilah yang menjadi salah satu celah bagi para manajer dalam melakukan praktik manipulasi beban pajaknya sehingga beban yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dasar teori keagenan dalam tindakan agresivitas pajak diperankan komisaris sebagai *principal* dan direksi sebagai *agent*. Dalam hal ini komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi direksi serta berupaya agar perusahaan membayar pajak dengan taat pada pemerintah. Namun disisi lain direksi (*agent*) berupaya untuk memaksimalkan laba yang dimiliki, sehingga direksi akan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat menekan beban pajak yang dibayar melalui tindakan agresivitas pajak, baik dengan cara yang sehat maupun tidak (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

### 2.1.2. Agresivitas Pajak

Dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) proporsi pajak merupakan yang terbesar dalam sektor penerimaan negara. Karena itulah aturan perpajakan menjadi hal krusial yang diatur sedemikian rupa. Tidak lain tujuannya untuk mengatur sistem perpajakan negara guna memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai skema atau peraturan yang ditetapkan dengan tujuan tunggal atau dominan yaitu untuk menghindari pajak yang sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Agresivitas pajak adalah serangkaian perencanaan pajak yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak namun masih sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga sering disebut juga sebagai *tax avoidance* (Wicaksono 2017). Dalam (Kim & Zhang, 2016) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat berbentuk apa saja selama beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Agresivitas pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang didefinisikan sebagai suatu situasi ketika perusahaan mempunyai wewenang dalam melakukan kebijakan pajak dan terdapat kemungkinan kebijakan tersebut untuk tidak diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum. Tindakan pajak agresif tidak hanya bagian dari perencanaan atas penurunan laba kena pajak namun juga bagian dari aktivitas penghematan yang dilakukan perusahaan baik yang sesuai peraturan berlaku maupun tidak sesuai karena dalam hal ini tindakan agresivitas pajak dapat berbentuk apapun

selama beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (Ridha & Martani, 2014).

Menurut Gemilang (2017) dalam Ariyani *et al.* (2019), perusahaan yang agresif terhadap pajak dianggap memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran pajak terutang yang akan meningkatkan laba untuk mendanai investasi perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Namun, kerugian juga ada apabila perusahaan tersebut terlalu agresif terhadap pajak. Yaitu, kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan.

Semakin besar laba yang dilaporkan oleh manajemen dalam laporan keuangan, maka pajak yang dibayar juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil laba yang dilaporkan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan maka pajak yang dibayar juga semakin minim. Oleh karena itu, manajer sebagai pihak yang mengetahui dan memiliki wewenang atas seluruh informasi perusahaan, berusaha penuh untuk meminimalisir beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Namun disisi lain manajer tentu tidak ingin melaporkan laba yang terlalu kecil karena akan berdampak pada keputusan investor atau bahkan dapat menimbulkan masalah agensi dengan pemilik. Hal-hal yang telah disebutkan itulah turut menjadi dasar dalam tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan.

### **2.1.3. Koneksi Politik Dewan Komisaris**

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang menjalin hubungan dekat atau mengupayakan adanya kedekatan secara politik dengan politisi atau orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Perusahaan juga memanfaatkan adanya koneksi politik dalam menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis (Ariyani et al., 2019).

Koneksi politik dapat dianggap sebagai kontrak implisit antara perusahaan dan politisi/birokrat. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dan akses preferensial ke sumber daya pemerintah dengan memanfaatkan politisi atau birokrat (Indarto & Widarjo, 2021).

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada dasarnya dewan komisaris adalah suatu organ perseroan dalam pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan yang dalam hal ini dikelola oleh dewan direksi (Iswari et al., 2019).

Berdasarkan pengertian diatas maka koneksi politik dewan komisaris adalah koneksi suatu individu - yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi - dengan pemerintah atau individu yang pernah menjabat atau sedang menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen (Simanjuntak, 2020).

#### 2.1.4. Koneksi Politik Dewan Direksi

Faccio (2007) dalam Kim & Zhang (2016) menyatakan bahwa koneksi politik bisa menjadi “sumber daya” yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini koneksi politik juga dapat menambah *value* perusahaan termasuk akses ke lingkup pemerintahan, akses preferensial ke investasi modal pemerintah, dan akses preferensial keuangan bank. Perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat lebih agresif terhadap pajak karena perusahaan ini memiliki *privilege* seperti deteksi risiko yang lebih rendah, informasi yang lebih baik mengenai akan adanya perubahan peraturan perpajakan, kemungkinan biaya politik yang lebih rendah terkait perencanaan pajak yang agresif, serta kecenderungan mengambil risiko yang lebih tinggi (Jian et al., 2012).

Indonesia menerapkan dua sistem kepemimpinan (*two tier system*) dalam perseroan. Dewan direksi memegang peranan vital dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (Iswari et al., 2019). Dengan adanya pemisahan peran antara dewan direksi dengan dewan komisaris, maka dewan direksi memiliki peran yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka koneksi politik dewan direksi adalah koneksi suatu individu - yang bertanggungjawab atas pengurusan operasional perusahaan - dengan pemerintah atau individu yang pernah menjabat atau sedang



menjadi pejabat pemerintah, pejabat militer, atau anggota parlemen (Simanjuntak, 2020).

#### **2.1.5. Karakter Eksekutif**

Dalam struktur organisasi, para eksekutif memiliki peran dalam mengambil keputusan yang berpengaruh penting bagi perusahaan, baik dari sisi operasional maupun perpajakan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya terlebih dahulu atas kebijakan dan keputusan dari manajer atau pimpinan yang berkaitan. Budiman & Miharjo, (2012) menyatakan bahwa karakter eksekutif adalah salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, begitupula dengan tiap pimpinan perusahaan memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakteristik ini yang akan mempengaruhi pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan termasuk didalamnya beban pajak perusahaan (Praptidewi & Sukartha, 2016).

Paligorova (2010) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) dimaknai sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* (laba) yang dirumuskan dengan standar deviasi EBIT dibagi dengan total aset, baik penyimpangan tersebut bersifat kurang dari yang direncanakan atau lebih dari yang direncanakan. Dyreng et al (2010) juga menggunakan EBIT (*Earning Before Interest and Taxes*) dibagi dengan total aset dalam melihat pengaruh karakter eksekutif

terhadap agresivitas pajak. Namun dijelaskan pula bahwa belum diketahui dengan pasti sejauh mana setiap keputusan yang diambil eksekutif adalah karena alasan pajak sehingga hanya menafsirkan berdasarkan hasil yang didapatkan. Karena pengukuran tersebut hanya melihat dari sisi EBIT yaitu laba sebelum pajak, maka belum dapat dipastikan berapa besaran pajak yang dibayar, oleh karena itu dalam penelitian ini memodifikasi rasio yang membandingkan EAT (*Earning After Tax*) dengan EBIT (*Earning Before Interests and Taxes*) agar dapat melihat korelasi karakter eksekutif dengan agresivitas pajak. Sehingga semakin besar rasio EAT dibagi EBIT maka semakin bersifat *risk taker* pimpinan eksekutif suatu perusahaan terhadap keputusan perpajakannya.

Pada dasarnya setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan eksekutif akan menimbulkan risikonya masing masing. Adanya karakter pengambil risiko tinggi (*risk taker*) yang dimiliki oleh pimpinan eksekutif perusahaan berkorelasi dengan pengambilan keputusan yang berani mengambil risiko yang besar termasuk didalamnya tindakan agresivitas pajak.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh hubungan terkait variabel koneksi politik, karakter eksekutif, dan agresivitas pajak. Penelitian tersebut terdiri dari beberapa penelitian internasional dan juga penelitian dalam negeri. Adapun ringkasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Budiman & Miharjo (2012)	Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Variabel X: Karakter Eksekutif  Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa karakter eksekutif yang memiliki karakter <i>risk taker</i> secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )
2	Pranoto & Widagdo (2016)	Pengaruh Koneksi Politik dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Aggressiveness</i>	Variabel X: - Koneksi Politik - <i>Corporate Governance</i>  Variabel Y: <i>Tax Aggressiveness</i>	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Koneksi Politik berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> 2. <i>Corporate Governance</i> tidak memiliki pengaruh pada <i>tax aggressiveness</i>

Disambung halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Kim & Zhang (2016)	<i>Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness</i>	Variabel X: <i>Corporate Political Connection</i>  Variabel Y: <i>Tax Aggressiveness</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan dua tahap <i>Heckman</i> hasilnya hubungan politik perusahaan memiliki keterkaitan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih karena adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada menurunnya transparansi laporan keuangan.
4	Ferdiawan & Firmansyah (2017)	Pengaruh <i>Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earning Management</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: - <i>Political Connection</i> - <i>Foreign Activity</i> - <i>Real Earning Management</i>  Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Hubungan politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak 3. Perusahaan cabang atau anak perusahaan dapat memanfaatkan aktivitas luar negeri untuk mengurangi pajak melalui skema <i>profit shifting</i> dan <i>profit holding</i>

Disambung halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	(Wicaksono, 2017)	Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia	Variabel X: Koneksi Politik  Variabel Y: Agresivitas pajak  Variabel Kontrol: Pertumbuhan laba, ukuran perusahaan, ROA, dan inventory intensity ratio	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik melalui aspek kepemilikan pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan koneksi politik melalui hubungan komisaris memperlihatkan hasil yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
6	Putri (2018)	Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	Variabel X: Koneksi Politik  Variabel Y: Agresivitas Pajak  Variabel Z (Moderasi): Kepemilikan institusional  Variabel Kontrol: - Ukuran Perusahaan - <i>Capital Intensity</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Hubungan politik mempengaruhi adanya penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mempengaruhi hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak 3. Intensitas modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak dan ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak

Disambung halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	(Iswari et al., 2019)	Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange	Variabel X: - Koneksi politik dewan direksi - Koneksi Politik dewan komisaris  Variabel Y: Agresivitas Pajak	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan koneksi politik dewan direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
8	(Fajri, 2019)	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)	Variabel X: Koneksi Politik  Variabel Y: Penghindaran Pajak  Variabel Kontrol: ROA, <i>Capital intensity</i> , <i>leverage</i> , <i>size</i> .	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel <i>control</i> ROA dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negative signifikan sedangkan variabel <i>control</i> leverage dan <i>size</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Disambung halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	(Asadanie & Venusita, 2020)	Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel X: Koneksi Politik</p> <p>Variabel Y: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Kontrol: ROE dan Ukuran Perusahaan</p>	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan lewat ETR sehingga semakin tinggi koneksi politik maka semakin rendah ETR yang dalam artian semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
10	(Aprilia et al., 2020)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2014-2018)	<p>Variabel X: - Intensitas Aset - Karakter Eksekutif - Koneksi Politik - Leverage</p> <p>Variabel Y: Tax Avoidance</p>	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara simultan intensitas aset, karakter eksekutif, koneksi politik, dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara parsial, hanya karakter eksekutif yang berpengaruh terhadap tax avoidance.
11	(Harsono & Gitasari, 2021)	Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak	<p>Variabel X: - Koneksi Politik - Ukuran Dewan - Independensi Dewan - Kepemilikan Institusional - Ukuran Auditor</p> <p>Variabel Y: Agresivitas Pajak</p>	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran dewan dan ukuran auditor berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik, independensi dewan, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Sumber: Review berbagai artikel

### 2.3. Kerangka Konseptual

*Agency theory* oleh Jensen dan Mekling (1976) menyatakan adanya kontrak antara satu atau lebih individu (*principal*) yang mempunyai kepentingan dengan individu lain (*agent*) untuk mengambil tanggungjawab dalam mengimplementasikan kepentingan tersebut. Implementasi kontrak tersebut akan mengarah pada *agency cost* yaitu cost yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dengan tujuan agar aktivitas yang dilakukan oleh *agent* serupa dengan kepentingan *principal*. Kontrak ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban *agent* kepada *principal*. Meskipun dalam kontrak terdapat *agency cost*, namun setiap individu baik *principal* maupun *agent* memiliki motivasi untuk menguntungkan masing-masing individu, hal inilah yang mendasari adanya konflik kepentingan diantara *principal* dan *agent*.

Konflik kepentingan yang timbul dalam penelitian ini adalah antara komisaris sebagai *principal* dan direksi/manajer sebagai *agent*. Hal tersebut dikarenakan terdapat asimetri informasi antara manajer dan *principal*. Manajer yang mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi mengenai operasional perusahaan dibanding *principal*. Sehingga keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan, salah satu keputusannya yaitu perencanaan terhadap perpajakan (*tax planning*).

*Tax planning* yang dilakukan oleh manajer bertujuan agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah sehingga meningkatkan laba bersih perusahaan. Hal tersebut akan berdampak pula pada insentif yang didapatkan oleh manajer atas kinerjanya

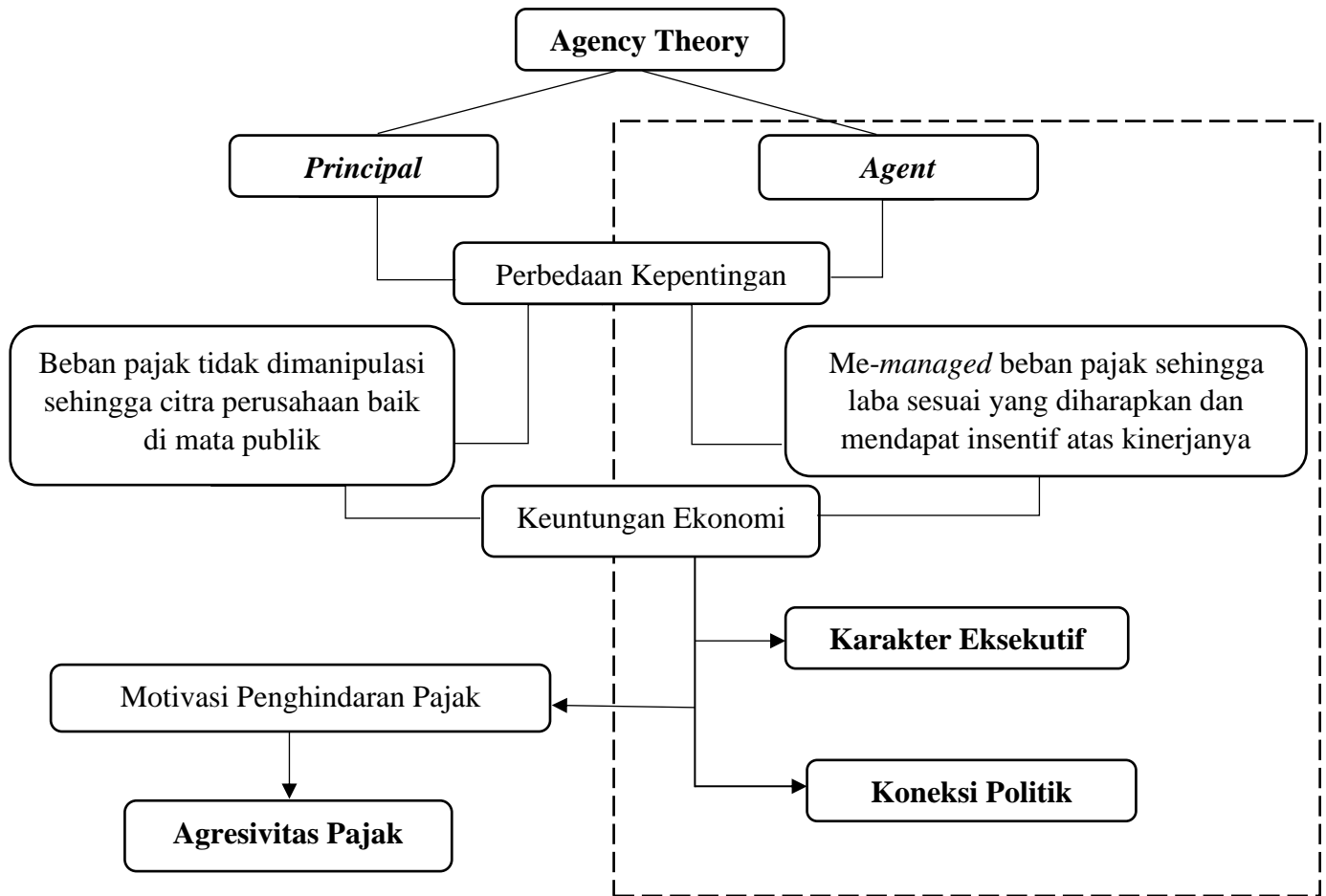


yang baik. Sedangkan dewan komisaris sebagai pengawas aktivitas direksi justru mengharapkan perusahaan patuh akan peraturan perpajakan dan tidak memanipulasinya agar citra perusahaan di mata publik tetap baik.

Selain konflik asimetri informasi, terdapat konflik antara *principal* dan *agent* yang didasari oleh motivasi dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh manajer berupa insentif atas kinerjanya yang baik. Disisi lain dewan komisaris mengharapkan keuntungan berupa citra perusahaan yang terjaga dengan baik agar keberlangsungan usaha dapat terjamin serta meningkatnya citra perusahaan sebagai wajib pajak yang patuh (Ayu Widya Lestari & Putri, 2017).

Dalam hal ini pihak *agent*/manajer memanfaatkan karakter eksekutif dan koneksi politik yang dimilikinya. Karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko yang besar, salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak dan nantinya diharapkan sepadan dengan keuntungan yang didapat. Disamping itu koneksi politik juga ikut andil dalam pemanfaatan *privilege* melalui pimpinan eksekutif yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah/politisi atau yang menjabat sebagai petinggi pemerintahan. Adanya karakter eksekutif dan koneksi politik akan ikut mempengaruhi keputusan manajer dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, baik melalui cara yang sehat maupun tidak sehat sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dan diperoleh laba sesuai dengan keinginan perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka secara singkat dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konseptual melalui Gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

Sumber: *Review* berbagai artikel

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak**

Koneksi politik dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber daya berharga yang dimilikinya. Adanya koneksi politik dengan pemerintah akan memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa perlakuan istimewa dalam hal perpajakan. Dewan komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi dan membimbing dewan direksi. Dalam hal hubungannya dengan teori agensi, dewan komisaris sebagai *principal* dan dewan direksi sebagai *agent* yang masing masing memiliki kepentingan dalam menjalankan suatu perusahaan.

Dewan komisaris juga bertanggungjawab dalam memastikan perusahaan tetap *well-managed* dan mencegah aktivitas yang berpotensi merugikan perusahaan. (Iswari et al., 2019) menyatakan bahwa suatu perusahaan akan lebih berhati-hati dan mengupayakan agar menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan dewan komisaris seperti BUMN akan dievaluasi oleh pemerintah yang salah satu bahan pertimbangannya yaitu kontribusi pajak yang dilakukan terhadap negara (Kim & Zhang, 2016). Dengan demikian perusahaan akan memberikan kontribusi kepada negara sehingga dewan komisaris akan tetap dipertahankan dalam posisinya. Selain itu ketaatan pajak yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi pandangan publik terhadap eksistensi perusahaan tersebut (Aprilia et al., 2020). Dalam hal ini adanya koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris diharapkan akan mendorong perusahaan agar mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan agresivitas pajak.

Asumsi ini diperkuat berdasarkan penelitian yang dilakukan (Iswari et al., 2019) yang memberikan hasil bahwa adanya koneksi politik dewan komisaris akan mengurangi atau mencegah tindak agresivitas pajak. Penelitian oleh (Jian et al., 2012), (Mulyani et al., 2014), (Pranoto & Widagdo, 2016) serta (Harsono & Gitasari, 2021) juga turut mendukung hasil yang sama dengan (Iswari et al., 2019). Agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan ETR yang sifatnya berkebalikan yaitu semakin besar nilai ETR maka semakin kecil adanya indikasi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas dan sifat pengukuran ETR maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Koneksi politik dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak**

### **2.3.2. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak**

Indonesia adalah negara yang menerapkan dua sistem kepemimpinan dalam perusahaan. *Agency theory* dalam hipotesis ini yaitu terdapat dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai manajer yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Dewan komisaris yang mengharapkan adanya kepatuhan terhadap perpajakan agar perusahaan dikenal baik oleh pemerintah dan publik, namun dari sisi *agent* (direksi) menghendaki adanya penghindaran pajak agar meningkatkan laba bersih yang dimiliki perusahaan. Dewan direksi dalam tugasnya mengelola operasional perusahaan diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan.

Direksi berwenang untuk mengelola suatu perusahaan yang kegiatannya diawasi oleh komisaris. Pengelolaan yang baik oleh direksi dapat terlihat dari laporan keuangan terkhusus laba bersih yang dihasilkan. Disisi lain laba bersih yang didapat oleh perusahaan tidak lepas dari beban pajak yang dibayar perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula beban pajak perusahaan. Karena itu, dewan direksi mengupayakan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan agar laba bersih yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui laba bersih yang tinggi, direksi akan mendapat insentif dalam bentuk bonus dan remunerasi sebagai imbal atas kinerjanya yang baik (Iswari et al., 2019).

Keputusan yang diambil dewan direksi berorientasi dalam mendapatkan keuntungan ekonomi yang tinggi, salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak melalui mekanisme *tax planning*. Dalam mencapai tujuannya, koneksi politik dapat dimanfaatkan oleh dewan direksi yang memiliki hubungan erat dengan petinggi pemerintah/politisi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif karena mendapat *privilege* dari pemerintah. Salah satu *privilege* yang dapat dimanfaatkan berupa akses untuk melobi pemerintah guna memberi manfaat pada perusahaan (Pranoto & Widagdo, 2016).

Sejalan dengan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan oleh (Kim & Zhang, 2016) menemukan hasil bahwa dewan direksi yang memiliki koneksi politik berpotensi melakukan tindakan agresivitas pajak. (Wahab et al., 2017), (Wicaksono, 2017), (Ferdiawan & Firmansyah, 2017), (Fajri, 2019) serta (Asadanie & Venusita, 2020) juga memberikan hasil yang sama yaitu adanya indikasi tindakan agresivitas

pajak jika perusahaan memiliki koneksi politik. ETR digunakan dalam mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini. ETR memiliki sifat berkebalikan, yaitu semakin besar indikasi agresivitas pajak maka semakin kecil nilai ETRnya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas dan sifat pengukuran ETR maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Koneksi politik dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak**

### **2.3.3. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak**

*Principal* dan *agent* diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi kepentingan pribadi. Manajer diberi kuasa oleh *principal* dalam membuat berbagai keputusan untuk mengelola operasional perusahaan. Sedangkan *principal* memiliki tanggungjawab dalam mengawasi kinerja manajer. Meskipun ada laporan keuangan sebagai salah satu kontraktual antara *principal* dan *agent* namun tetap diperlukan pengawasan terhadap laporan tersebut (Fitriya, 2020).

Eksekutif (pimpinan) perusahaan memiliki karakter atau preferensi risiko yang berbeda-beda. Menurut Budiman & Miharjo (2012) karakter eksekutif diprosikan melalui besarnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang terbagi menjadi karakter *risk taker* dan *risk averse*. Karakter pengambil risiko (*risk taker*) pimpinan eksekutif perusahaan diukur dengan rasio EAT dibagi dengan EBIT agar dapat melihat korelasinya terhadap pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin besar rasio perbandingan EAT dengan EBIT mengindikasikan semakin bersifat *risk taker*

pimpinan perusahaan terhadap keputusan perpajakannya. Risiko yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu risiko dalam tindakan agresivitas pajak. Pimpinan eksekutif dapat mengambil keputusan untuk melakukan agresivitas pajak melalui mekanisme *tax planning* yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar.

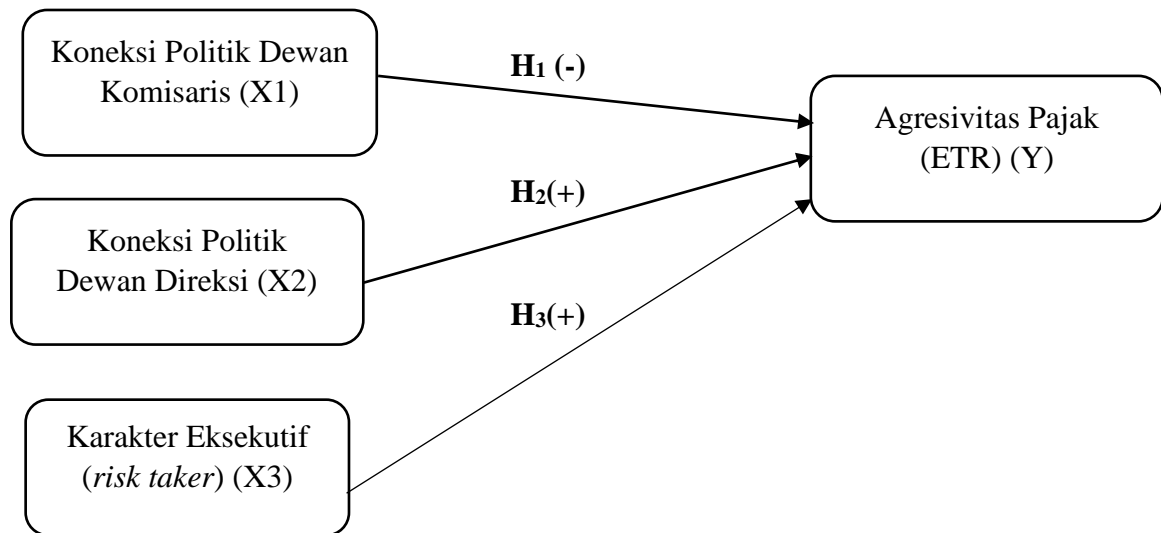
Karakter *risk taker* yang dimiliki oleh manajer akan berdampak pada keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil tentunya yang memiliki risiko lebih tinggi, dalam hal ini karakter *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi yang tinggi pula (Praptidewi & Sukartha, 2016). Dorongan pada manajer dengan karakter *risk taker* tentu akan berdampak pada preferensi risiko dalam perpajakan. Karakter *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko yang lebih besar melalui tindakan agresivitas pajak guna memperoleh laba bersih yang lebih tinggi.

Asumsi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Budiman & Miharjo, 2012) yang menemukan hasil bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya (tindak agresivitas pajak). Selain itu (Butje & Tjondro, 2014), (Hanafi & Harto, 2014), (Oktamawati, 2017), (Aprilia et al., 2020) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa eksekutif yang berani mengambil risiko yang lebih besar atau disebut *risk taker* terindikasi melakukan tindak agresivitas pajak dibanding dengan eksekutif dengan karakter *risk averse*. Penelitian ini menggunakan ETR dalam mengukur agresivitas pajak. ETR memiliki sifat berkebalikan, yaitu semakin besar indikasi agresivitas pajak maka semakin kecil

nilai ETRnya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas dan sifat pengukuran ETR maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Karakter eksekutif *risk taker* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak**

Berdasarkan seluruh penjelasan hipotesis diatas, maka model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

Sumber: *Review* berbagai artikel



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.1.1. Variabel Dependen (Agresivitas Pajak)

Dalam penelitian ini variabel terikat yang akan diuji pengaruhnya yaitu agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan praktek penghindaran pajak secara ofensif dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin banyak celah yang dimanfaatkan perusahaan agar besar pajak terutanganya berkurang maka semakin agresif perusahaan tersebut terhadap perpajakan.

Tindakan seberapa agresifnya perusahaan terhadap pajak terutanganya dapat diukur melalui *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dalam hal ini semakin tinggi nilai ETR maka semakin rendah indikasi perusahaan melakukan agresivitas pajak. Sedangkan semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan maka semakin besar indikasi adanya tindakan agresivitas pajak yang berkorelasi dengan beban pajak yang dibayar semakin rendah. Menurut (Dyrenge et al., 2016) pengukuran agresivitas pajak dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}_t \text{ (Cash Tax Paid)}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_t}$$

Dalam penelitian ini beban pajak merupakan seluruh beban pajak bersih (*Cash Tax Paid*) yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam suatu periode (t). Sedangkan

laba sebelum pajak merupakan laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan, data tersebut dapat diambil pada Laporan Laba Rugi tepatnya pada akun Laba Sebelum Pajak.

### **3.1.2. Variabel Independen (Koneksi Politik dan Karakter Eksekutif)**

Dalam penelitian ini variabel bebas yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat adalah karakter eksekutif dan koneksi politik.

#### **1. Koneksi Politik Dewan Komisaris**

Koneksi politik dewan komisaris adalah jajaran komisaris perusahaan yang saat ini menjabat atau pernah menjabat di pemerintahan/TNI/POLRI. Adanya koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris dimanfaatkan untuk mendapatkan kanal istimewa untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris sebagai berikut:

1. Dewan komisaris rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik.
2. Dewan komisaris rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan.
3. Dewan komisaris merupakan pejabat militer/TNI/POLRI.
4. Dewan komisaris merupakan mantan pejabat militer atau mantan pejabat pemerintahan.

Jika dewan komisaris memiliki salah satu dari kriteria diatas maka diberi skor 1 yang berarti dewan komisaris perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, sedangkan apabila dewan komisaris di perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki salah satu dari kriteria diatas maka diberi skor 0 yang berarti tidak ada koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris pada perusahaan tersebut.

## **2. Koneksi Politik Dewan Direksi**

Koneksi politik dewan direksi adalah jajaran eksekutif direksi perusahaan yang saat ini menjabat atau pernah menjabat di pemerintahan/TNI/POLRI. Adanya koneksi politik yang dimiliki dewan direksi dapat digunakan untuk mendapatkan perlakuan istimewa seperti akses yang lebih mudah dalam pendanaan eksternal maupun kanal istimewa untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Semakin dimanfaatkannya koneksi politik oleh perusahaan maka kesempatan dalam melakukan agresivitas pajak juga semakin besar sehingga perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis serta dapat mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Pengukuran koneksi politik menggunakan variabel *dummy* yaitu diberi kode 1 (satu) jika perusahaan memiliki koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan adanya koneksi politik menurut (Simanjuntak, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Dewan direksi rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik.
2. Dewan direksi rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintahan.

3. Dewan direksi merupakan pejabat militer/TNI/POLRI.
4. Dewan direksi merupakan mantan pejabat militer atau mantan pejabat pemerintahan.

Jika dewan direksi memiliki salah satu dari kriteria diatas maka diberi skor 1 yang berarti jajaran direksi perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, sedangkan apabila dewan direksi di perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki salah satu dari kriteria diatas maka diberi skor 0 yang berarti tidak ada koneksi politik yang dimiliki jajaran direksi pada perusahaan tersebut.

### **3. Karakter Eksekutif**

Eksekutif sebagai pimpinan perusahaan memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan. Karakter eksekutif merupakan jenis karakter yang dimiliki oleh pimpinan eksekutif dalam preferensinya terhadap risiko. Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini berupa risiko dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Adanya karakter *risk taker* yang dimiliki oleh pimpinan eksekutif perusahaan mengindikasikan pengambilan keputusan yang berani mengambil risiko yang besar termasuk didalamnya tindakan agresivitas pajak.

Pengukuran karakter eksekutif menggunakan rasio yang membandingkan EAT (*Earning After Tax*) dengan EBIT (*Earning Before Interests and Taxes*). Paligorova (2010) mengukur karakter eksekutif melalui standar deviasi EBIT dibagi dengan total aset. Namun dalam penelitian ini menggunakan rasio yang membandingkan EAT dengan EBIT karena lebih merepresentasikan adanya besaran pajak yang dibayarkan

sehingga pengaruh karakter eksekutif terhadap agresivitas pajak lebih terukur. Semakin besar rasionya maka semakin bersifat *risk taker* (pengambil risiko) eksekutif perusahaan tersebut, begitupula sebaliknya jika semakin kecil rasionya maka eksekutif semakin *risk averse* (penghidar risiko). Karakter eksekutif dalam preferensi risikonya diukur dengan rasio yang dirumuskan sebagai berikut:

$$RISK = \frac{EAT (Earning After Tax)}{EBIT(Earning Before Interests and Taxes)}$$

Keterangan:

EAT (Earning After Taxes) = Laba setelah pajak

EBIT (Earning Before Interests and Taxes) = Laba sebelum bunga dan pajak

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini diambil dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 yang termuat dalam situs [idx.co.id](http://idx.co.id). Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut diantaranya:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2020.

2. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami delisting atau tidak aktif perdagangan sahamnya selama tahun 2019-2020
3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2020

**Tabel 3. 1 Penentuan Jumlah Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.	47
2.	Perusahaan pertambangan yang mengalami delisting atau tidak aktif perdangannya selama tahun 2019-2020	(2)
3.	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2019-2020	(24)
Jumlah (sampel)		21

*Sumber: Data diolah penulis (2023)*

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur dengan angka atau numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang selanjutnya diolah dalam penelitian ini. Dalam hal ini informasi didapatkan dari sumber yang telah ada yaitu data laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020 yang diakses melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh melalui metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka dipilih karena merepresentasikan kebutuhan penulis dalam memperoleh atau mengumpulkan data laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan dalam situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dalam periode 2019-2020. Data yang diperoleh penulis berkaitan dengan fenomena ditemukan dari internet, buku, jurnal dan artikel penelitian, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.5. Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda dengan alat bantu menggunakan aplikasi *software* statistik berupa IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 22. Penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

#### **3.5.1. Uji Deskriptif**

Menurut (Ghozali, 2018) statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Analisis ini digunakan untuk memperjelas karakteristik dan situasi atau keadaan data. Analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan nilai rata-rata, nilai minimum, dan standar deviasi dari variabel penelitian sehingga secara kontekstual lebih mudah dimengerti.

### 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji prasyarat sebelum melakukan uji regresi berganda (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan data yang valid, maka dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel memiliki distribusi normal atau tidak, apabila variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan (Ghozali, 2018). Suatu data dikatakan normal apabila grafik distribusi dengan titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal atau searah mengikuti garis diagonal. Teknik lain yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika tingkat signifikan uji uji kenormalan diatas distribusi data lebih besar atas tingkat alpha (0,05), maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika signifikansi uji normalitas distribusi data tidak lebih dari tingkat alpha (0,05) maka data tidak terdistribusi normal.

#### b) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan atau kemiripan antara sesama variabel independen dalam suatu model. Jika terdapat kemiripan antara variabel independen, mengakibatkan korelasi atau hubungan yang sangat kuat. Uji ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF



(*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Data dikatakan bebas dari multikolonieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 (Ghozali, 2018).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan nilai *absolute* model yang tidak sama untuk setiap nilai variabel bebas sepanjang periode observasi. Data yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas akan membentuk grafik *scatterplot* yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya koneksi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui apakah di dalam model terdapat autokorelasi dapat menggunakan tabel Durbin Watson ( $d_l$  dan  $d_u$ ) dengan kriteria jika  $d_u < d_{hitung} < 4-d_u$  maka tidak terjadi autokorelasi.

### 3.5.3. Model Regresi Linier Berganda

Model yang digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel independen atas variabel dependen. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{TAG} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- TAG : Agresivitas pajak perusahaan yang diukur menggunakan proksi ETR  
 $\alpha$  : Konstanta  
 $\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi  
 $X_1$  : Koneksi Politik Dewan Komisaris  
 $X_2$  : Koneksi Politik Dewan Direksi  
 $X_3$  : Karakter Eksekutif  
 $e$  : Standar *error*

#### 3.5.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan uji kelayakan model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilihat melalui nilai signifikansi dengan alpha kurang dari 0,05. Jika nilai alpha kurang dari 0,05 maka model yang digunakan layak untuk diteliti. Sedangkan jika nilai alpha lebih dari 0,05 maka model yang digunakan tidak layak untuk diteliti.

#### 3.5.5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan oleh variabel dependen (Ghozali, 2018).

### 3.5.6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t atau uji parsial. Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh untuk satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan mengasumsikan variabel lainnya konstan.

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% ( $<0,05$ ), maka dianggap memiliki pengaruh signifikan yang artinya hipotesis diterima. Sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% ( $>0,05$ ), maka dianggap memiliki pengaruh yang tidak signifikan yang artinya hipotesis tidak diterima.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2019 - 2020. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan serta memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi secara dominan pada komoditas tambang mineral logam, batubara, dan minyak dan gas untuk di produksi dan dipasarkan.

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia selama periode pengamatan yaitu 2019 dan 2020. Adapun sampel perusahaan diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 21 sampel perusahaan, dikarenakan tahun penelitian selama tahun 2019 dan 2020 maka total observasi sebanyak 42 data. Berikut merupakan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 4. 1 Perusahaan Sampel**

No.	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
3	BIPI	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
4	BYAN	PT Bayan Resources Tbk
5	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk
6	ELSA	PT Elnusa Tbk
7	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk
8	FIRE	PT Alfa Energi Investama Tbk
9	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
10	HRUM	PT Harum Energy Tbk
11	IFSH	PT Ifishdeco Tbk
12	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
13	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
14	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
15	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk
16	MYOH	PT Samindo Resources Tbk
17	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
18	PTRO	PT Petrosea Tbk
19	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco
20	TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk
21	ZINC	PT Kapuas Prima Coal Tbk

*Sumber: Data diolah penulis (2023)*

## 4.2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berikut merupakan proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum secara statistik atas variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif melihat besaran nilai terendah (min), nilai tertinggi (max), mean atau rata rata, serta simpangan baku (std dev) pada setiap variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	42	0,09	0,75	0,3324	0,17372
Koneksi Politik Dewan Komisaris	42	0	1	0,64	0,485
Koneksi Politik Dewan Direksi	42	0	1	0,14	0,354
Karakter Eksekutif	42	0,28	0,92	0,6711	0,13299
Valid N (listwise)	42				

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Pada tabel 4.2 diperoleh hasil analisis deskriptif dengan total observasi penelitian (N) adalah 42. Variabel agresivitas pajak yang diprosikan melalui *effective tax rate* (ETR) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 diperoleh nilai terendah sebesar 0,09 yang dimiliki oleh HRUM (PT Harum Energy

Tbk) tahun 2020. Sementara nilai tertinggi variabel agresivitas pajak sebesar 0,75 dimiliki oleh FIRE (PT Alfa Energi Investama) tahun 2020. Nilai rata rata agresivitas pajak menunjukkan nilai 0,3324 serta simpangan baku yang menunjukkan nilai 0,17372.

Variabel koneksi politik dewan komisaris menggunakan dummy variable sehingga menunjukkan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1. Nilai rata-rata koneksi politik dewan komisaris menunjukkan nilai 0,64 serta simpangan baku yang menunjukkan nilai 0,485.

Variabel koneksi politik dewan direksi juga menggunakan dummy variable sehingga menunjukkan nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1. Nilai rata-rata koneksi politik dewan direksi menunjukkan nilai 0,14 serta simpangan baku yang menunjukkan nilai 0,354.

Variabel karakter eksekutif menunjukkan nilai terendah sebesar 0,28 yang dimiliki oleh ANTM (PT Aneka Tambang Tbk) tahun 2019. Sementara nilai tertinggi karakter eksekutif sebesar 0,92 dimiliki oleh HRUM (PT Harum Energy Tbk) tahun 2020. Nilai rata rata karakter eksekutif menunjukkan nilai 0,6711 serta simpangan baku yang menunjukkan nilai 0,13299.

#### **4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik bertujuan agar data yang

dihasilkan adalah data yang valid dan tidak bias. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

#### 4.2.2.1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dibutuhkan untuk melihat nilai residual dalam penelitian sudah terdistribusi dengan normal. Model regresi disebut baik apabila nilai residualnya berdistribusi dengan normal. Oleh karena itu digunakan uji Komogorov-Smirnov dalam menguji normalitas model regresi. Jika tingkat alpha atau *Asymp.Sig* (2-tailed) lebih tinggi dari 0,05 maka model regresi tersebut telah berdistribusi normal. Melalui SPSS, diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut.

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14331503
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,103
	Negative	-,115
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,191 <sup>c</sup>

Sumber: Data diolah dengan *SPSS* (2023)

Hasil uji normalitas berdasarkan tabel 4.3 diatas, nilai alpha atau *Asymp.Sig* (2-tailed) lebih dari 0,05 ( $0,191 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa nilai residual data berdistribusi normal. Namun terjadi masalah setelah kemudian dilakukan uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Maka dari itu dilakukan transformasi data ke



dalam bentuk Ln. Akan tetapi masih terjadi gejala heterokedastisitas dan autokorelasi, oleh karena itu dilakukan metode penyembuhan data menggunakan Cochrane-Orcutt. Dalam menggunakan metode Cochrane-Orcutt ini, data akan ditransformasi ke dalam bentuk Lag. Setelah data ditransformasi dua kali, berikut hasil uji normalitas melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data**

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,37929504
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,082
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Diolah dengan SPSS (2023)

Setelah ditransformasi kedalam bentuk Ln atau Logaritma Natural dan dilanjutkan dengan transformasi ke bentuk Lag, nilai Asymp.Sig (2-tailed) pada tabel 4.4 menjadi 0,200. Nilai ini lebih tinggi dari alpha 0,05 yang menandakan bahwa data telah berdistribusi dengan normal.

#### 4.2.2.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian mulikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen yaitu antara koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif dalam persamaan model regresi. Jika nilai

Tolerance > 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10,00, maka pada model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Koneksi Politik Dewan Komisaris	0,964	1,037
Koneksi Politik Dewan Direksi	0,782	1,279
Karakter Eksekutif	0,786	1,272

Dependent Variable: Agresivitas Pajak  
Sumber: Data Diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.5, nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen, yaitu koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif lebih tinggi dari 0,10. Dan nilai VIF masing masing variabel independen juga lebih rendah dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada persamaan model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.2.2.3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian terhadap heterokedastisitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan nilai absolute model yang tidak sama untuk setiap nilai variabel independen sepanjang periode observasi. Apabila tidak terdapat gejala heterokedastisitas maka model regresi dapat dikatakan baik. Melalui uji park dengan cara melakukan pemangkatan terhadap residual, lalu dilakukan transformasi Ln (*Logaritma Natural*) kemudian melakukan regresi terhadap varaibel independen.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,485	,390		-6,371	,000
Koneksi Politik Dewan Komisaris	-,549	,640	-,137	-,858	,396
Koneksi Politik Dewan Direksi	1,891	1,046	,320	1,808	,079
Karakter Eksekutif	1,220	1,231	,175	,991	,328

Dependent Variable: LN\_RESIDUAL

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Pada tabel 4.6 hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji park dengan melihat signifikansi masing masing varibel independen, jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan tabel 4.6 seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 pada uji park, maka ditarik kesimpulan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi.

#### 4.2.2.4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Watson.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,592 <sup>a</sup>	,350	,298	,39437	1,862

a. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi  
 b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Pada tabel 4.7 nilai Durbin-Watson (DW) atau  $d$  hitung sejumlah 1,862. Dengan jumlah variabel bebas ( $k$ ) yaitu 3 dan jumlah total sampel ( $n$ ) setelah dilakukan metode penyembuhan Cochrane-Orcutt yaitu 41. Diperoleh dari tabel durbin Watson nilai  $dU$  sebesar 1,6603 dan nilai  $4-dU$  sebesar 2,3397. Sehingga dari kriteria Durbin-Watson agar terbebas dari autokorelasi yaitu jika  $dU < d$  hitung  $< 4-dU$  maka 1,6603 lebih kecil daripada 1,862 dan 1,862 lebih kecil daripada 2,3397. Oleh karena kriteria terpenuhi maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

### 4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier (*multiple linear regression*) berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dalam analisis regresi penelitian ini digunakan variabel koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif sebagai variabel independen, serta agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,690	0,090		-7,668	0,000
Koneksi Politik Dewan Komisaris	-0,365	0,148	-0,334	-2,473	0,018
Koneksi Politik Dewan Direksi	-0,032	0,241	-0,020	-0,131	0,897
Karakter Eksekutif	-1,045	0,284	-0,550	-3,679	0,001

Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini berdasarkan tabel 4.8 adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,690 - 0,365X_1 - 0,032X_2 - 1,045X_3 + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -0,690. Artinya apabila tidak ada variabel koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif, maka nilai ETR sebesar -0,690.
2. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel koneksi politik dewan komisaris sebesar -0,365 dengan arah negatif. Artinya setiap kenaikan koneksi politik dewan komisaris sejumlah 1, ETR mengalami penurunan sebesar 0,365. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel koneksi politik dewan direksi sebesar -0,032 dengan arah negatif. Artinya setiap kenaikan koneksi politik dewan direksi sejumlah 1, ETR

mengalami penurunan sebesar 0,032. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel karakter eksekutif sebesar -1,045 dengan arah negatif. Artinya setiap kenaikan karakter eksekutif sejumlah 1, ETR mengalami penurunan sebesar 1,045. Dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

#### 4.2.4 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan uji ketepatan model. Dari uji F, dapat diketahui jika variabel independen yaitu koneksi politik dewan komisaris dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif layak digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,103	3	1,034	6,651	,001 <sup>b</sup>
Residual	5,755	37	,156		
Total	8,858	40			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4.9, nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa variabel independen yaitu koneksi politik dewan komisari, koneksi

politik dewan direksi, dan karakter eksekutif dianggap layak dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

#### 4.2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independen yaitu koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,592 <sup>a</sup>	0,350	0,298	0,39437

a. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi  
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,298 yang berarti pengaruh variabel koneksi politik dewan komisaris, koneksi politik dewan direksi, dan karakter eksekutif memberikan pengaruh sebesar 29% terhadap variabel agresivitas pajak. Sisa sebesar 71% dipengaruhi variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.2.6 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi (Sig) pada masing masing variabel dengan alpha 0,05 pada tabel 4.8

dan melihat arah pengaruh pada nilai koefisien regresi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.8 dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

### **1. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak**

Variabel koneksi politik dewan komisaris memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,365 dengan nilai signifikansi 0,018 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05 (0,018 < 0,05) dan nilai t yaitu -2,473 memiliki arah negatif. Nilai koefisien pada hasil penelitian mengindikasikan hubungan negatif antara koneksi politik dewan komisaris dengan ETR. Hal ini berarti koneksi politik dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ETR sebagai proksi agresivitas pajak. Dalam penelitian ini pengukuran agresivitas pajak diproksikan oleh nilai ETR yang berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak yang berarti semakin rendah nilai ETR maka semakin perusahaan terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Adanya koneksi politik pada dewan komisaris akan turut merendahkan nilai ETR sebagai proksi dalam agresivitas pajak. Dan jika tidak terdapat koneksi politik dewan komisaris maka nilai ETR akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya koneksi politik pada dewan komisaris mengindikasikan semakin tinggi upaya perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak yang diukur melalui semakin rendahnya nilai ETR. Sehingga hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama yaitu adanya koneksi politik dewan komisaris akan mencegah atau mengurangi tindak agresivitas pajak. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama **ditolak**.



## 2. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel koneksi politik dewan direksi memiliki nilai koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,032 dengan nilai signifikansi 0,897 yang berarti lebih besar dari alpha 0,05 ( $0,897 > 0,05$ ) dan nilai t yaitu -0,131 memiliki arah negatif. Nilai koefisien pada hasil penelitian mengindikasikan hubungan negatif antara koneksi politik dewan direksi dengan ETR. Hal ini berarti koneksi politik dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap ETR sebagai proksi agresivitas pajak namun pengaruhnya tidak signifikan.

Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya koneksi politik pada dewan direksi belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya agresivitas pajak yang diukur melalui nilai ETR. Sehingga hasil ini tidak mendukung hipotesis kedua yaitu adanya koneksi politik dewan direksi mengindikasikan adanya tindak agresivitas pajak yang dilihat melalui rendahnya nilai ETR perusahaan. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua **ditolak**.

## 3. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Variabel karakter eksekutif memiliki koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -1,045 dengan nilai signifikansi 0,001 yang berarti lebih kecil dari alpha 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) dan nilai t yaitu -3,679 memiliki arah negatif. Nilai koefisien pada hasil penelitian mengindikasikan hubungan negatif antara karakter eksekutif dengan ETR. Hal ini berarti karakter eksekutif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ETR

sebagai proksi agresivitas pajak. Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan oleh nilai ETR yang berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak, hal ini berarti semakin rendah nilai ETR maka semakin perusahaan terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Oleh karena itu semakin tinggi rasio karakter eksekutif akan turut menurunkan nilai ETR sebagai proksi dalam agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio karakter eksekutif (*risk taker*) mengindikasikan semakin tinggi upaya perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak yang diukur melalui semakin rendahnya nilai ETR. Sehingga hasil ini mendukung hipotesis ketiga yaitu semakin bersifat *risk taker* pimpinan eksekutif perusahaan mengindikasikan adanya tindak agresif terhadap pajak. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga **diterima**.

### **4.3. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis**

#### **4.3.1. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa koneksi politik dewan komisaris berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ETR sebagai proksi agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya koneksi politik pada dewan komisaris akan menurunkan tingkat ETR perusahaan. Pengaruh negatif terhadap ETR menandakan semakin besar indikasi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki koneksi politik dewan komisaris.

Tidak sejalan dengan teori agensi menyatakan bahwa terdapat *agency problem* antara komisaris (*principal*) dan *agent* (direksi) yang masing masing memiliki kepentingan dalam menjalankan suatu perusahaan. Dalam perspektif *agency theory* dewan komisaris sebagai pengawas kinerja *agent* mengharapkan agar perusahaan patuh akan peraturan perpajakan. Namun dari sisi *agent* berusaha agar melakukan *tax planning* sehingga akan meringankan beban pajak perusahaan dan meningkatkan laba bersih perusahaan, yang nantinya akan berdampak pada insentif yang diberikan atas kinerjanya yang baik.

Mengacu pada hasil penelitian, adanya koneksi politik dewan komisaris justru meningkatkan indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilihat dari nilai ETR yang lebih rendah dari 25%. Hal ini dijelaskan karena perusahaan menganggap membayar pajak merupakan salah satu kendala untuk menjalankan kepentingan perusahaan sehingga menggunakan koneksi politik yang dalam hal ini dimiliki dewan komisaris agar dapat mempengaruhi utang pajaknya. Semakin rendah nilai ETR perusahaan maka semakin agresif dalam mengatur perpajakannya.

Penelitian ini mendapati sebanyak 14 sampel perusahaan yang memiliki koneksi politik dewan komisaris dari total 21 sampel. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat beberapa perusahaan yang memiliki koneksi politik dewan komisaris dan melakukan agresivitas pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya koneksi politik dewan komisaris tidak menjadi tolak ukur signifikan dalam penurunan atau pencegahan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Seperti pada tahun 2019 PT

Harum Energy Tbk dan tahun 2020 PT Bukit Asam Tbk yang memiliki koneksi politik dewan komisaris dan diduga melakukan praktek agresivitas pajak yang terlihat pada nilai ETR di bawah tarif 25% yaitu masing-masing sebesar 0,145 dan 0,193.

Penelitian (Kim & Zhang, 2016) menunjukkan bahwa adanya koneksi politik memberikan keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Keuntungan yang didapat dengan adanya koneksi politik pada dewan komisaris dapat berupa kelengkapan informasi yang dimiliki untuk memberikan pengarahan yang menguntungkan bagi perusahaan. Disebut menguntungkan karena dengan adanya kelengkapan informasi ini, perusahaan dapat menetapkan langkah-langkah untuk memenuhi kepentingan perusahaan, salah satunya kepentingan dalam bertindak agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ferdawan & Firmansyah, 2017), (Asadanie & Venusita, 2020), dan (Simanjuntak, 2020) yang menunjukkan bahwa koneksi politik dewan komisaris berpengaruh signifikan dan turut meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Iswari et al., 2019) yang menunjukkan bahwa koneksi politik dewan komisaris berpengaruh signifikan dan turut mengurangi tindakan agresivitas pajak.

#### **4.3.2. Pengaruh Koneksi Politik Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa koneksi politik dewan direksi tidak memiliki berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ETR

sebagai proksi agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya koneksi politik dewan direksi memiliki arah negatif terhadap ETR yang berarti semakin besar koneksi politik dewan direksi maka semakin kecil nilai ETR perusahaan, namun tidak mempengaruhi keputusan direksi dalam melakukan agresivitas pajak. Oleh karena itu koneksi politik dewan direksi dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya tindak agresif terhadap pajak.

Dalam hasil penelitian ini, hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Hipotesis dalam penelitian disebutkan bahwa adanya koneksi politik dewan direksi akan meningkatkan indikasi tindakan agresivitas pajak yang diukur dari semakin kecilnya nilai ETR. Namun hasil penelitian pada perusahaan pertambangan sebagai objek dalam penelitian ini, adanya koneksi politik dewan direksi justru tidak mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Hal ini dijelaskan dalam data yang diperoleh pada penelitian ini, sebagian besar dewan direksi pada perusahaan pertambangan justru tidak terkoneksi secara politik baik dengan tokoh partai politik, jabatan di pemerintahan, hingga menjadi tokoh TNI atau POLRI. Hasil menunjukkan terdapat perusahaan dengan koneksi politik dewan direksi yang tidak melakukan agresivitas pajak dengan tingkat ETR diatas 25%. Seperti PT Adaro Energy Tbk di tahun 2019 yang memiliki koneksi politik dewan direksi namun diduga tidak melakukan agresivitas pajak yang terlihat pada nilai ETR sebesar 0,39 (>25%). Terdapat pula perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik dewan direksi namun diduga melakukan agresivitas pajak dengan nilai ETR yang dimiliki

dibawah 25%. Seperti PT Petrosea Tbk di tahun 2020 yang tidak memiliki koneksi politik dewan direksi namun diduga melakukan agresivitas pajak yang terlihat pada nilai ETR sebesar 0,154 (<25%). Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian didapat hasil bahwa perusahaan yang memiliki ataupun tidak memiliki koneksi politik dewan direksi tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dimiliki perusahaan.

Telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) bahwa dewan direksi harus menjaga integritas dan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam perpajakan. Dewan direksi juga bertanggungjawab untuk menetapkan strategi bisnis jangka panjang agar perusahaan berjalan sesuai visi dan misi perusahaan serta dewan direksi bertanggungjawab dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Teori *agency* menyatakan bahwa dewan direksi adalah *agent* perusahaan yang memiliki kewenangan mengelola perusahaan dibawah pengawasan dewan komisaris yang masing-masing memiliki kepentingan. Diasumsikan dewan direksi akan memanfaatkan koneksi politik yang dimilikinya dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun, tidak terdapat pengaruh koneksi politik yang dimiliki dewan direksi terhadap agresivitas pajak, menandakan bahwa pengawasan dewan komisaris pada kinerja dewan direksi telah efektif dilaksanakan.

Dewan direksi diindikasikan lebih memusatkan perhatian pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu peraturan perpajakan di Indonesia juga semakin kompleks sehingga dikhawatirkan risiko yang ditanggung

apabila manajemen atau direksi melakukan tindakan penghindaran pajak atau pelanggaran hukum perpajakan adalah lebih besar daripada manfaat atau keuntungan yang diterima dari penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iswari et al., 2019) yang menyatakan bahwa koneksi politik dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Kim & Zhang, 2016) dan (Wahab et al., 2017) yang menunjukkan bahwa koneksi politik dewan direksi berpengaruh signifikan dan turut meningkatkan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

#### **4.3.3. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ETR sebagai proksi agresivitas pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar rasio karakter eksekutif akan menurunkan tingkat ETR perusahaan sebagai pengukuran dalam agresivitas pajak. Pengaruh negatif terhadap ETR menandakan semakin besar indikasi agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila rasio karakter eksekutif semakin besar (*risk taker*).

Dalam hasil penelitian ini, hipotesis yang diajukan dapat diterima. Semakin pimpinan eksekutif bersifat *risk taker* (pengambil resiko) yaitu rasio karakter eksekutif semakin besar turut meningkatkan adanya indikasi agresivitas pajak lewat nilai ETR yang semakin kecil. Sebaliknya semakin pimpinan eksekutif bersifat *risk averse*

(penghindar resiko) yaitu rasio karakter eksekutif semakin kecil turut menurunkan adanya indikasi agresivitas pajak lewat nilai ETR yang semakin besar.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata variable karakter eksekutif adalah 0,6711. Beberapa perusahaan dengan karakter eksekutif *risk taker* (pengambil risiko) yang diduga melakukan agresivitas pajak, seperti PT Petrosea Tbk pada tahun 2019 memiliki nilai karakter eksekutif *risk taker* dengan nilai diatas rata rata yaitu 0,768 (>0,6711) dan diduga melakukan agresivitas pajak dengan nilai ETR yang lebih kecil dari 25% yaitu 0,21. PT Bayan Resources pada tahun 2020 memiliki nilai karakter eksekutif *risk taker* dengan nilai diatas rata-rata yaitu 0,771 (>0,6711) dan diduga melakukan agresivitas pajak dengan nilai ETR 0,15.

Sejalan dengan teori agensi yang mengamsusikan *principal* dan *agent* mempunyai proporsi kepentingannya masing-masing. Kepentinngan *agent* yaitu agar mendapatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimumkan beban perpajakan. Sehingga *agent* akan mendapatkan kompensasi yang besar atas kinerjanya yang baik melalui laporan keuangan. Sedangkan pihak *principal* (komisaris) berusaha tidak menghindari pajak agar terhindar dari adanya masalah hukum akibat dari tindakan agresivitas pajak.

Dalam penelitian ini tingginya rasio karakter eksekutif merefleksikan kecenderungan sifat pimpinan eksekutif yang lebih condong pada *risk taker* atau pengambil risiko besar. Namun rasio dalam karakter eksekutif tidak sepenuhnya mencerminkan bahwa sifat dari pimpinan eksekutif adalah *risk taker* (pengambil



resiko besar) atau *risk averse* (penghindar risiko). Tentu ada banyak faktor lain yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan pimpinan eksekutif terhadap preferensi resiko yang dipilih. Namun dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa keputusan akan resiko besar yang diambil didasarkan pada penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) dan (Aprilia et al., 2020) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan dan turut meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang diprosikan dengan ETR.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Koneksi politik dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Dapat disimpulkan bahwa adanya koneksi politik dewan komisaris maka semakin rendah nilai ETR, artinya semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu hipotesis pertama ditolak.
2. Koneksi politik dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Dapat disimpulkan bahwa adanya koneksi politik dewan direksi tidak mengindikasikan adanya tindak agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu hipotesis kedua ditolak.
3. Karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Dapat disimpulkan semakin tinggi rasio karakter eksekutif (*risk taker*) maka akan semakin merendahkan nilai ETR yang mengartikan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu hipotesis ketiga diterima.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perusahaan diharapkan dapat lebih memperhitungkan segala risiko yang ditanggung atas setiap kebijakan atau keputusan yang diambil karena akan mempengaruhi citra perusahaan di mata publik apabila menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki atau jika terbukti melakukan pelanggaran pajak secara hukum.
2. Penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam memuat sumber informasi tentang koneksi politik yaitu hanya melalui data sekunder berupa laporan keuangan dan publikasi internet. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan riset lebih mendalam seperti menambah metode wawancara.
3. Pada penelitian ini juga terbatas pada jumlah sampel dan periode penelitiannya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variasi jumlah sampel maupun variasi sektor perusahaan yang diteliti serta menyesuaikan dengan data terbaru yang telah diperbaharui.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>
- Ariyani, P., Lestari, S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Ayu Widya Lestari, G., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Budiman, J., & Miharjo, S. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Thesis Universitas Gadjah Mada*.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1158060>
- Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2016). Changes in Corporate Effective Tax Rates Over the Past Twenty-Five Years. *Journal of Financial Economics*, 60, 187–243. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- Faccio, M. (2007). The Characteristics of Politically Connected Firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1–34. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–18.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102. <https://doi.org/10.1257/aer.91.4.1095>
- Fitriya, F. A. (2020). *Analisis Pengaruh Karakter Eksekutif, Return On Asset, Leverage*

*dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.* IAIN Salatiga.

- Frank, M. M., Lynch, J. L., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84, 467–496.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value. *Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhn088>
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Peghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–11.
- Harsono, B., & Gitasari, R. P. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Conference on Management Business Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1343–1357.
- Indarto, B. A., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Avoidance in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 6(5), 276–282. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.5.1136>
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jian, M., Li, W., & Zhang, H. (2012). How does state ownership affect tax avoidance? Evidence from China. *School of Accountancy: Singapore Management University*, 1–40. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2239837>
- Kartana, W., & Ni Gusti Agung Sri, W. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Beban Pajak Perusahaan: Studi Empiris Sektor Manufaktur

- di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 273–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.178>
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. (2015). Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Li,
- Mulyani, S., Darminto, & Endang, M. G. W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2008-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Paligorova, T. (2010). Corporate Risk-Taking and Ownership Structure. *Bank of Canada Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1364393>
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472–486.
- Praptidewi, L. P. M., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 426–452.
- Putri, V. R. (2018). Keterkaitan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Perbankan*, 4(1), 20–28.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. In *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII Fakultas Ekonomi Universitas Mataram dan IAI-KAPd*.
- Simanjuntak, C. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2019. In *Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Wahab, A. E., Arif, M. A., Marzuki, A., & Sanusi, A. (2017). Political Connection, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 18, 63–86. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Tabulasi Data**

No.	Kode Emiten	Tahun	Koneksi Politik Dewan Komisaris	Koneksi Politik Dewan Direksi	Karakter Eksekutif	Agresivitas Pajak
1	ADRO	2019	1	1	0,613	0,392
		2020	1	1	0,661	0,732
2	BYAN	2019	1	0	0,717	0,239
		2020	1	0	0,771	0,151
3	FIRE	2019	0	0	0,627	0,719
		2020	0	0	0,601	0,752
4	GEMS	2019	0	0	0,652	0,344
		2020	0	0	0,739	0,249
5	HRUM	2019	1	0	0,722	0,145
		2020	1	0	0,919	0,086
6	ITMG	2019	0	0	0,696	0,412
		2020	0	0	0,544	0,333
7	MBAP	2019	0	0	0,732	0,254
		2020	1	0	0,735	0,249
8	MYOH	2019	0	0	0,747	0,255
		2020	0	0	0,776	0,222
9	PTBA	2019	1	0	0,745	0,232
		2020	1	0	0,739	0,193
10	PTRO	2019	0	0	0,768	0,217
		2020	0	0	0,908	0,154
11	TOBA	2019	1	1	0,422	0,150
		2020	1	1	0,584	0,095
12	BIPI	2019	1	0	0,539	0,228
		2020	1	0	0,575	0,179
13	ELSA	2019	1	0	0,764	0,267
		2020	1	0	0,722	0,253
14	ENRG	2019	1	1	0,316	0,676
		2020	1	1	0,493	0,630

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Lampiran 1. Sambungan**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Koneksi Politik Dewan Komisaris</b>	<b>Koneksi Politik Dewan Direksi</b>	<b>Karakter Eksekutif</b>	<b>Agresivitas Pajak</b>
15	<b>RUIS</b>	2019	<b>1</b>	<b>0</b>	0,653	0,399
		2020	<b>1</b>	<b>0</b>	0,573	0,378
16	<b>ANTM</b>	2019	<b>1</b>	<b>0</b>	0,282	0,621
		2020	<b>1</b>	<b>0</b>	0,700	0,290
17	<b>CITA</b>	2019	<b>0</b>	<b>0</b>	0,775	0,225
		2020	<b>0</b>	<b>0</b>	0,772	0,225
18	<b>IFSH</b>	2019	<b>0</b>	<b>0</b>	0,850	0,351
		2020	<b>0</b>	<b>0</b>	0,731	0,389
19	<b>INCO</b>	2019	<b>1</b>	<b>0</b>	0,644	0,384
		2020	<b>1</b>	<b>0</b>	0,791	0,354
20	<b>ZINC</b>	2019	<b>1</b>	<b>0</b>	0,732	0,281
		2020	<b>1</b>	<b>0</b>	0,558	0,455
21	<b>MDKA</b>	2019	<b>1</b>	<b>0</b>	0,653	0,368
		2020	<b>1</b>	<b>0</b>	0,644	0,433



**Lampiran 2. Tabulasi Data Rasio Karakter Eksekutif**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>EBIT</b>	<b>EAT</b>	<b>Karakter Eksekutif</b>
1	<b>ADRO</b>	2019	659.103	404.190	0,613
		2020	222.165	146.927	0,661
2	<b>BYAN</b>	2019	311.625.370	223.394.384	0,717
		2020	426.635.647	328.738.867	0,771
3	<b>FIRE</b>	2019	16.816.689.880	10.543.645.972	0,627
		2020	23.012.602.323	13.830.828.934	0,601
4	<b>GEMS</b>	2019	100.340.160	65.408.886	0,652
		2020	127.132.647	93.931.379	0,739
5	<b>HRUM</b>	2019	25.627.895	18.504.237	0,722
		2020	64.171.397	59.004.794	0,919
6	<b>ITMG</b>	2019	185.908	129.426	0,696
		2020	72.553	39.469	0,544
7	<b>MBAP</b>	2019	48.438.664	35.459.061	0,732
		2020	37.373.592	27.467.417	0,735
8	<b>MYOH</b>	2019	34.925.112	26.072.373	0,747
		2020	29.009.788	22.509.492	0,776
9	<b>PTBA</b>	2019	5.445.162	4.056.888	0,745
		2020	3.231.685	2.386.819	0,739
10	<b>PTRO</b>	2019	40.581	31.175	0,768
		2020	35.536	32.279	0,908
11	<b>TOBA</b>	2019	62.869.168	26.549.065	0,422
		2020	42.082.914	24.563.977	0,584
12	<b>BIPI</b>	2019	36.311.285	19.579.517	0,539
		2020	35.334.706	20.311.234	0,575
13	<b>ELSA</b>	2019	466.749	356.477	0,764
		2020	344.877	249.085	0,722
14	<b>ENRG</b>	2019	88.571.182	28.003.535	0,316
		2020	108.753.590	53.659.332	0,493

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Lampiran 2. Sambungan**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>EBIT</b>	<b>EAT</b>	<b>Karakter Eksekutif</b>
15	<b>RUIS</b>	2019	50.653.045.141	33.085.812.498	0,653
		2020	48.080.574.358	27.541.932.779	0,573
16	<b>ANTM</b>	2019	687.034.053	193.851.147	0,282
		2020	1.641.178.012	1.149.352.803	0,700
17	<b>CITA</b>	2019	848.256.705.676	657.788.325.709	0,775
		2020	841.881.871.416	649.938.571.941	0,772
18	<b>IFSH</b>	2019	131.557.551.953	111.790.475.821	0,850
		2020	43.709.603.309	31.935.192.392	0,731
19	<b>INCO</b>	2019	89.136	57.400	0,644
		2020	104.654	82.819	0,791
20	<b>ZINC</b>	2019	89.136	57.400	0,644
		2020	104.654	82.819	0,791
21	<b>MDKA</b>	2019	108.471.334	70.827.123	0,653
		2020	56.204.449	36.196.133	0,644

**Lampiran 3. Tabulasi Data Rasio Agresivitas Pajak**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Cash Tax Paid</b>	<b>EBIT</b>	<b>ETR</b>
1	<b>ADRO</b>	2019	258.304	659.103	0,392
		2020	162.517	222.165	0,732
2	<b>BYAN</b>	2019	74.447.630	311.625.370	0,239
		2020	64.498.261	426.635.647	0,151
3	<b>FIRE</b>	2019	12.087.053.700	16.816.689.880	0,719
		2020	17.316.572.840	23.012.602.323	0,752
4	<b>GEMS</b>	2019	34.501.604	100.340.160	0,344
		2020	31.706.995	127.132.647	0,249
5	<b>HRUM</b>	2019	3.705.029	25.627.895	0,145
		2020	5.505.306	64.171.397	0,086
6	<b>ITMG</b>	2019	76.599	185.908	0,412
		2020	24.193	72.553	0,333
7	<b>MBAP</b>	2019	12.286.701	48.438.664	0,254
		2020	9.300.467	37.373.592	0,249
8	<b>MYOH</b>	2019	8.902.975	34.925.112	0,255
		2020	6.447.366	29.009.788	0,222
9	<b>PTBA</b>	2019	1.265.057	5.445.162	0,232
		2020	623.383	3.231.685	0,193
10	<b>PTRO</b>	2019	8.820	40.581	0,217
		2020	5.467	35.536	0,154
11	<b>TOBA</b>	2019	9.435.327	62.869.168	0,150
		2020	3.984.286	42.082.914	0,095
12	<b>BIPI</b>	2019	8.294.589	36.311.285	0,228
		2020	6.319.284	35.334.706	0,179
13	<b>ELSA</b>	2019	124.569	466.749	0,267
		2020	87.104	344.877	0,253
14	<b>ENRG</b>	2019	59.893.984	88.571.182	0,676
		2020	68.493.955	108.753.590	0,630

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Lampiran 3. Sambungan**

<b>No.</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Cash Tax Paid</b>	<b>EBIT</b>	<b>ETR</b>
15	<b>RUIS</b>	2019	20.221.754.874	50.653.045.141	0,399
		2020	18.165.530.020	48.080.574.358	0,378
16	<b>ANTM</b>	2019	426.864.001	687.034.053	0,621
		2020	476.466.016	1.641.178.012	0,290
17	<b>CITA</b>	2019	190.735.673.500	848.256.705.676	0,225
		2020	189.578.307.160	841.881.871.416	0,225
18	<b>IFSH</b>	2019	46.148.960.000	131.557.551.953	0,351
		2020	17.014.904.060	43.709.603.309	0,389
19	<b>INCO</b>	2019	34.207	89.136	0,384
		2020	37.043	104.654	0,354
20	<b>ZINC</b>	2019	68.537.648.250	244.113.427.371	0,281
		2020	25.216.783.680	55.420.022.905	0,455
21	<b>MDKA</b>	2019	39.961.405	108.471.334	0,368
		2020	24.316.637	56.204.449	0,433

#### Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Koneksi Politik Dewan Komisaris	42	0	1	,64	,485
Koneksi Politik Dewan Direksi	42	0	1	,14	,354
Karakter Eksekutif	42	,28	,92	,6711	,13299
Agresivitas Pajak	42	,09	,75	,3324	,17372
Valid N (listwise)	42				

#### Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14331503
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,103
	Negative	-,115
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,191 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data ke LN

### 1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,44764061
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,058
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### 2. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Koneksi Politik Dewan Komisaris	,872	1,147
	Koneksi Politik Dewan Direksi	,750	1,334
	Karakter Eksekutif	,747	1,338

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

### 3. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,829	,802		-3,529	,001
	Koneksi Politik Dewan Komisaris	-,306	,772	-,065	-,396	,694
	Koneksi Politik Dewan Direksi	2,380	1,141	,369	2,087	,044
	Karakter Eksekutif	,547	1,705	,057	,321	,750

a. Dependent Variable: LN\_RESID

### 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,502 <sup>a</sup>	,252	,193	,46498	,945

a. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

## Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data ke LAG

### 1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,37929504
Most Extreme Differences	Absolute	,088
	Positive	,088
	Negative	-,082
Test Statistic		,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### 2. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Koneksi Politik Dewan Komisaris	,964	1,037
	Koneksi Politik Dewan Direksi	,782	1,279
	Karakter Eksekutif	,786	1,272

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak



### 3. Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,485	,390		-6,371	,000
	Koneksi Politik Dewan Komisaris	-,549	,640	-,137	-,858	,396
	Koneksi Politik Dewan Direksi	1,891	1,046	,320	1,808	,079
	Karakter Eksekutif	1,220	1,231	,175	,991	,328

a. Dependent Variable: LN\_RESIDUAL

### 4. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,592 <sup>a</sup>	,350	,298	,39437	1,862

a. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

## 5. Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,690	,090		-7,668	,000
	Koneksi Politik Dewan Komisaris	-,365	,148	-,334	-2,473	,018
	Koneksi Politik Dewan Direksi	-,032	,241	-,020	-,131	,897
	Karakter Eksekutif	-1,045	,284	-,550	-3,679	,001

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

## 6. Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,103	3	1,034	6,651	,001 <sup>b</sup>
	Residual	5,755	37	,156		
	Total	8,858	40			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi

## 7. Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,592 <sup>a</sup>	,350	,298	,39437

a. Predictors: (Constant), Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dewan Komisaris, Koneksi Politik Dewan Direksi